



**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

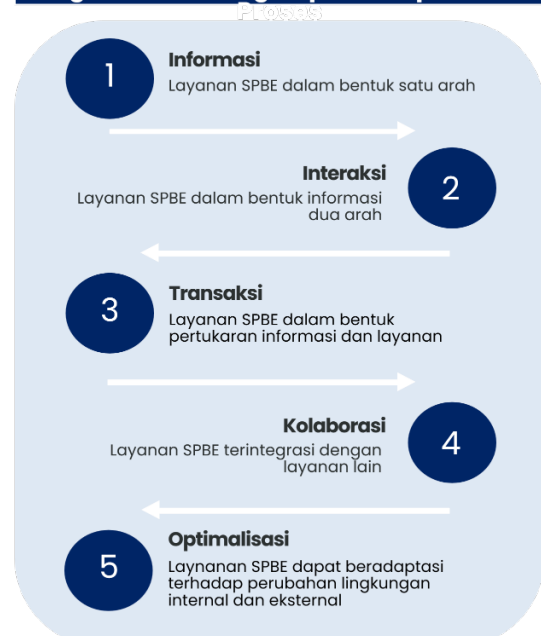
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



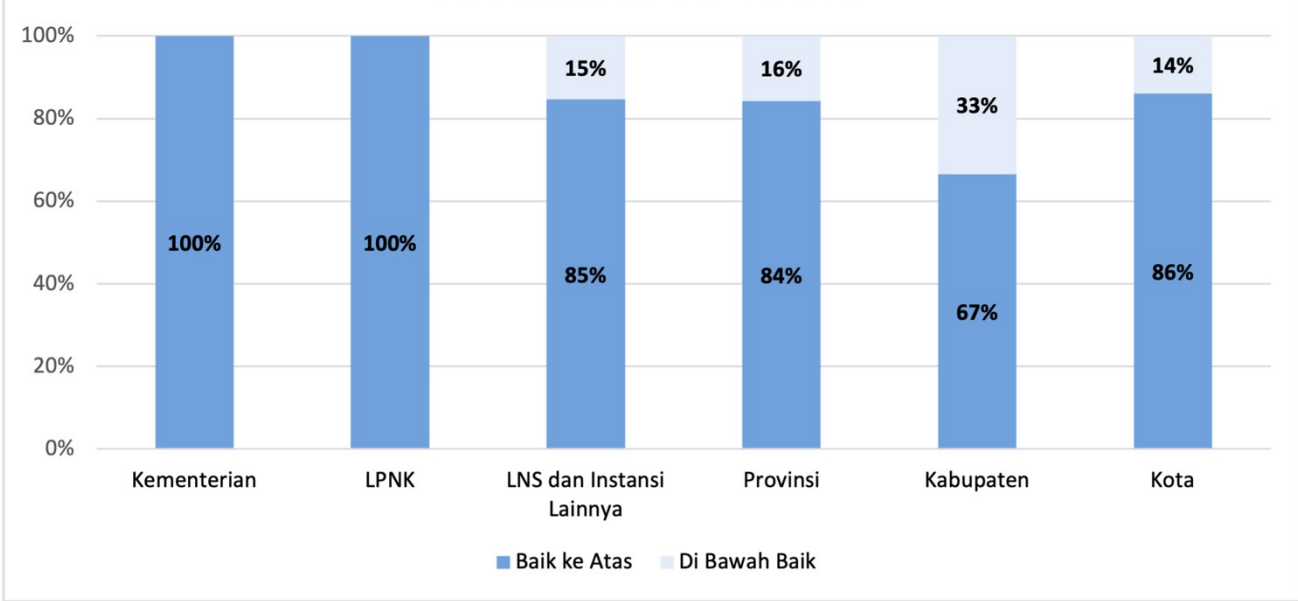


# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

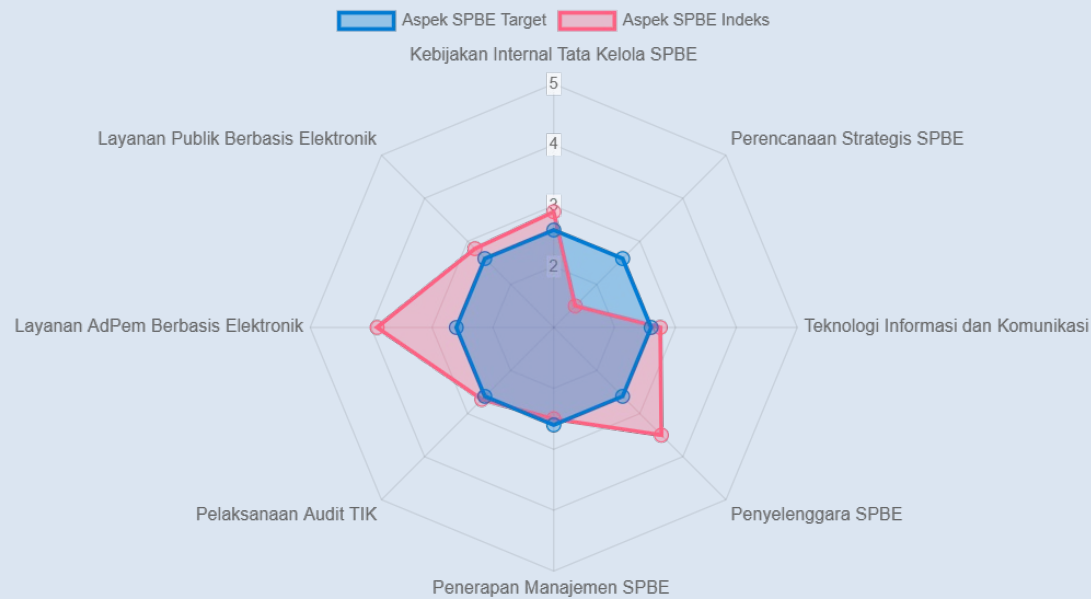
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – &lt; 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – &lt; 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – &lt; 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>&lt; 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>3,36</b>	<b>4,28</b>	<b>4,01</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>2,51</b>	<b>3,64</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,62</b>	<b>3,92</b>	<b>3,65</b>	<b>3,11</b>	<b>3,07</b>	<b>1,69</b>	<b>2,94</b>
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,86</b>	<b>2,87</b>	<b>2,61</b>	<b>2,31</b>	<b>2,17</b>	<b>1,13</b>	<b>2,03</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,78</b>	<b>4,44</b>	<b>4,26</b>	<b>3,81</b>	<b>3,98</b>	<b>3,32</b>	<b>4,05</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,98
Domain Kebijakan SPBE	2,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,40
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,55
Penerapan Manajemen SPBE	2,50
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	3,48
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa kebijakan yang meliputi : Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Inovasi proses bisnis, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Daerah, Layanan Jaringan, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Keamanan Informasi, dan konsep Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah mencakup semua aspek

- Kekuatan  
Pemenuhan aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE pada Pemkot Bandar Lampung telah mengatur penerapan SPBE pada seluruh unit kerja
- Kelemahan  
Pemenuhan Pemenuhan aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE pada Pemkot Bandar Lampung dengan domain Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan kematangannya dengan mengatur kebijakan untuk diterapkan pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bandar Lampung

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam Pemenuhan Aspek Perencanaan strategis yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, sedangkan pada domain Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum terpenuhi.

- Kekuatan  
Pemenuhan Aspek Perencanaan strategis yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE sudah terlaksana meskipun tanpa perencanaan
- Kelemahan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki dokumen keterlaksanaan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa dokumen Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah diterapkan untuk seluruh unit kerja

- Kekuatan  
Penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkot Bandar Lampung dilaksanakan pada seluruh unit kerja
- Kelemahan  
Penerapan Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data pada Pemkot Lampung baru diterapkan pada sebagian unit kerja berdasarkan bukti dokumen pendukung., perlu dilakukan peningkatan kematangan untuk tahun berikutnya

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE yang menjadi kekuatan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan SPBE

- Kekuatan  
Kekuatan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada aspek Penyelenggaraan SPBE terdapat pada domain Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE yang telah dilakukan reviu dan evaluasi
- Kelemahan

Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu dilakukan reviu dan evaluasi

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada Aspek Penerapan manajemen SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah dicapai yaitu pada indikator: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Semua indikator ini telah diterapkan pada seluruh unit kerja yang ada di bawah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

- Kekuatan  
Pada Bpemkot Bandar Lampung untuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan kepada seluruh unit.
- Kelemahan  
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan belum diterapkan dengan perencanaan berkelanjutan sehingga perlu ditingkatkan pelaksanaannya sehingga berdampak pada meningkatnya kematangan

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan pada Aspek Audit TIK telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang telah diterapkan untuk seluruh unit kerja di lingkungan pemkot Bandar Lampung

- Kekuatan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kekuatan pada indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang diselenggarakan untuk seluruh unit kerja berdasarkan bukti dokumen yang tersedia
- Kelemahan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melaksanakan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE secara terencana

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Lampung telah terlaksana berdasarkan bukti dokumen pelaksanaan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai telah memenuhi kriteria informasi, interaksi, dan transaksi bahkan sebagian domain telah dilakukan reviu dan evaluasi.

- Kekuatan  
Pelaksanaan Aspek layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai telah memenuhi kriteria informasi, interaksi, dan transaksi bahkan sebagian domain telah dilakukan reviu dan evaluasi.
- Kelemahan  
Pelaksanaan Aspek layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dengan melakukan reviu dan evaluasi yang berkelanjutan

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa indikator Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan

Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor satu, Layanan Publik Sektor dua, dan Layanan Publik Sektor tiga.

- Kekuatan  
Pemerintah Kota Lampung memiliki kekuatan pada aspek layanan Publik Berbasis elektronik berada pada indikator Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah dilakukan revidi dan evaluasi
- Kelemahan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kelemahan pada indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor satu, Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor dua, dan Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 karena penerapannya baru pada sebagian unit kerja di lingkungan Pemkot Bandar Lampung



## REKOMENDASI

Perlu melakukan revisi kebijakan untuk Pemenuhan aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE pada Pemkot Bandar Lampung dengan domain Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan kematangannya dengan mengatur kebijakan untuk diterapkan pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Pada Indikator manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan perlu dilakukan peningkatan level kematangan dengan pelaksanaan sudah pada seluruh unit kerja. Pelaksanaan Auit TIK perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dalam Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk indikator layanan punlik sektor satu, Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk indikator layanan punlik sektor duan, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk indikator layanan punlik sektor tiga perlu ditingkatkan

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	4
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
2024